

SEMINAR NASIONAL FISIP UNILA 2017

ISBN 978-979-95174-9-4

**PROSIDING :
MEMBANGUN ETIKA SOSIAL POLITIK
MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEADILAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG
(SEFILA) II. "MEMBANGUN ETIKA SOSIAL POLITIK MENUJU
MASYARAKAT YANG BERKEADILAN"**

Reviewer

Prof. Karomani
Prof. Bagong Suyanto
Prof. Yulianto
Dr. Sindung Haryanto
Dr. Abdul Firman Ashaf.
Dr. Bartoven Vivit Nurdin
Dr. Tina Kartika
Dr. Feni Rosalia

Tim Editor

Andri Marta, M.I.P
Izul Fatcu Reza, M.P.A
Selvi Diana Melinda, M.P.A

ISBN :

Penerbit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Bandar

Lampung. 35145

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dan puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan *Prosiding* ini dalam rangka kegiatan seminar nasional FISIP Unila ke-2 (SEFILA 2) dengan tema ” **Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan**”.

Tanpa ridho dan kasih sayang serta petunjuk dari –Nya mustahil *Prosiding* ini dapat terselesaikan. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah yang membantu baik dalam bentuk materil maupun non materil. Besar harapan kami bahwa *Prosiding* ini bermanfaat dan dapat digunakan mahasiswa dosen ataupun lapisan masyarakat lainnya.

Akhirnya,kami menyadari bahwa *Prosiding* ini masih jauh dari kesempurnaan, dan terdapat banyak kekurangan pada laporan, akan tetapi sedikit harapan semoga tugas yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Kebenaran dan kesempurnaan hanya Allah lah yang punya dan Mahakuasa.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penyusun



DAFTAR ISI

PENERAPAN <i>BALANCED SCORECARD</i> DALAM PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM	
Rahmat Hidayat ¹⁾ Jessica Elisabet Samosir ²⁾	1-10
MENEMUKAN POLA KOMUNIKASI PADA METODE MENGAJAR PARA PENGAJAR MUDA PADA PROGRAM INDONESIA MENGAJAR	
Nyimas Rina Desti Arifin ¹ , Tina Kartika ² , Mohammad Isa Gautama ³	11-22
PENGARUH <i>CELEBRITY ENDORSMENT</i> TERHADAP BRAND IMAGE <i>PADA</i> <i>KONSUMEN REMAJA</i> DI BANDAR LAMPUNG DAN IMPILKASINYA TERHADAP HARGA	
Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan	23-32
BUDAYA POLITIK ORGANISASI PEMERINTAH	
Feni Rosalia	33-38
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU JOB STRESS TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung)	
Asti Rahweni ¹ Yulianto ² Dewie Brima Atika ³	39-46
PSEUDO DEMOKRASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG (GSMK)	
Selvi Diana Meilinda ¹ , Yulianto ²	47-55
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI POLITEKNIK NEGERI BATAM	
Shinta Wahyu Hati ¹ , Awik Arumrasmy ²	56-76
KOLABORATIF PENGELOLAAN PARIWISATA TELUK KILUAN (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism)	
Novita Tresiana ¹ dan Noverman Duadj ²	77-84
PENINGKATAN POTENSI DAERAH MELALUI INOVASI TECHNOPARK DI PROVINSI LAMPUNG	
Intan Fitri Meutia ¹ , Bayu Sujadmiko ² , Agustina Pratiwi ³	85-95

KEKERASAN SIMBOLIK BERBASIS GENDER DALAM BUDAYA POP INDONESIA Sindung Haryanto	96-111
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN LAYANG DI JALAN TEUKU UMAR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK Syarief Makhya	112-120
AWI BAMBAN : Merawat Pengetahuan Lokal Menjadi Potensi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Pada Masyarakat Adat Sai Batin Keratuan Semaka Tanggamus Lampung Bartoven Vivit Nurdin ¹ , Damayanti ²	121-131
PARTAI POLITIK DAN PILKADA, KECENDERUNGAN KARTELISASI VERSUS IDEOLOGI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI TULANGBAWANG BARAT DAN PRINGSEWU 2017 Ari Darmastuti ¹ , Dwi Wahyu Handayani ² , Andri Marta ³	132-145
FIKIH INFORMASI DI ERA MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN KOMUNIKASI BERETIKA (Studi Kajian Fikih Informasi Sudut Pandang Ormas Muhammadiyah) Hendra A. Setyawan	146-157
CSR : ANTARA STRATEGI PROMOSI <i>PUBLIC RELATIONS</i> (PR) DAN PHILANTHROPY DALAM WUJUD KAPITALISME Ismi Yunarti	158-166
ANALISIS FRAMING MEDIA MASSA (REPUBLIKA.CO.ID DAN KOMPAS.COM) DALAM VONIS HUKUMAN DUGAAN KASUS PENODAAN AGAMA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA Emirullyta Harda Ninggar ¹ , Vivi Chyntia ²	167-175
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN LAMPUNG BARAT Hisna Caca Hayati	176-185
MODEL ADVOKASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MENDORONG KEBIJAKAN DISTRIBUSI PENGUASAAN LAHAN UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN Yana Fajar FY. Basori ¹ , Maulana Mukhlis ²	186-199
PENGALAMAN SOSIAL KONFLIK ANTAR ETNIK (Studi Fenomenologi Pengalaman Komunikasi pra dan pasca Penyerangan Etnik Lampung terhadap Etnik Bali di Desa Balinuraga Kec Way Panji Lampung Selatan) Ibrahim Besar	200-205



ANALISIS BERITA DONALD TRUMP DALAM KAMPAYE RASISME DI
CNN INDONESIA PERIODE OKTOBER 2016-FEBRUARI 2017 (Model
Analisis *Framing* Robert N. Entman)

Muhammad Hafiz Wiratama ¹ , Henny Dewi Laras Ati ²	206-217
PERSEPSI PERILAKU ETIS ONLINE RETAIL PADA KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN NIAT PEMBELIAN ONLINE	
Yuniarti Fiharini.....	218-229
URGENSI ETIKA DALAM KOMUNIKASI POLITIK	
Andy Cory Wardhani.....	230-235
PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI TELUK KILUAN	
Dian Kagungan.....	236-248
KAMPANYE <i>PUBLIC RELATIONS</i> PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) MELALUISOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG <i>ENTERPRENEUR CREATIVE</i> (KECE) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI (Studi Pada Calon Gubernur Lampung Mustafa)	
Rosy Febriani Daud ¹ , Deddy Aprilani ²	249-262
KEBIJAKAN MIGRASI TENAGA KERJA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI PROVINSI LAMPUNG	
Dwi Wahyu Handayani, ¹ Fahmi Tarumanegara, ² Gita Paramita Djausal ³	263-275
PRESPEKTIF <i>CIVIL SOCIETY</i> DAN PENYELENGGARA PEMILU TERKAIT POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (STUDI KASUS DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)	
Himawan Indrajat.....	276-287
PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP <i>VIRTUAL STORE</i> DAN <i>BRICK AND MORTAR STORE</i> SERTA PENGARUHNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN YANG BERDAMPAK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI BANDAR LAMPUNG	
Felias.....	288-297
PERSEPSI MAHASISWA ATAS TERPAAN ISU POLITIK TERHADAP CITRA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2014 (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2013)	
Aprika Rahayu ¹ , Toni Wijaya ²	298-311
FUNDAMENTALISME DAN DISINTEGRASI BANGSA: BERKORELASIKAH?	
Bangun Suharti.....	312-320



<i>CIVIL SOCIETY</i> DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) Rahayu Sulistiowati ¹ , Dewie Brima Atika ² , Ita Prihantika ³ , Selvi Diana Melinda ⁴	321-331
PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SEBAGAI BENTUK KINERJA YANG MENCERMINKAN ETIKA PUBLIK Devi Yulianti	332-345
PENGARUH IKLAN MEDIA CETAK DAN ONLINE TERHADAP MINAT MEMILIH PERGURUAN TINGGI IBI DARMAJAYA. ((Studi pada Siswa/i Kelas XII SMA Sederajat Di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Timur, Lampung)	
M. Bahrul Ulum ¹ , Faila Shofa ²	346-357
KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN PENERIMA RASKIN DI KOTA METRO LAMPUNG	
Ahmad Rifa'I ¹ , Ferry Triadmojo ²	358-370



KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN PENERIMA RASKIN DI KOTA METRO LAMPUNG

Ahmad Rifa'i¹ dan Ferry Triatmodjo²

¹Jurusan Ilmu Adm. Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unila

²Jurusan Ilmu Adm. Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unila
rifaiunila@gmail.com

ABSTRAK

Survey ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima Raskin di Kota Metro Lampung. Jumlah sampel adalah 375 KK penerima Raskin, di ambil secara proporsional per kelurahan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner terbuka. Teknik analisis data dilakukan dengan penghitungan rasio ketergantungan dan penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM) RTM penerima Raskin. Hasil survey menunjukkan nilai rasio ketergantungan RTM penerima Raskin Kota Metro adalah 64,7%, rasio ketergantungan anak adalah 53,4%, rasio ketergantungan lanjut usia adalah 11,3%. Nilai IPM RTM penerima Raskin Kota Metro adalah 70,31 yang berarti berada pada tingkatan *menengah-atas*. Untuk mengurangi rasio ketergantungan Pemkot Metro dapat melakukan transisi demografi untuk memperoleh —bonus demografi dan *window of opportunity*, akselerasi dan intensifikasi program wajar 12 tahun, pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidikan luar sekolah, dan madrasah salafiyah, pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, meningkatkan porsi anggaran, melakukan revitalisasi sarana sekolah, melibatkan RTM dalam kegiatan ekonomi mikro dan kecil untuk peningkatan daya beli, serta mengarahkan investasi pada sektor yang bersentuhan dengan RTM penerima Raskin.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan indikator klasik yang hingga saat ini menjadi momok bagi negara dunia ketiga. Millenium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan PBB tahun 2000 mengharapakan seluruh negara anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Mengingat kompleksnya permasalahan kemiskinan ini, diperlukan pengetahuan yang memadai dalam memahami akar permasalahan kemiskinan. Terdapat dugaan bahwa kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia disebabkan karena lebih mempergunakan pendekatan yang lebih bersifat —proyektif dan —bantuan sehingga tidak memberdayakan masyarakat. Lebih lanjut, ditengarai kegagalan penanggulangan kemiskinan diduga akibat kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Masalah kemiskinan di daerah perkotaan juga perlu mendapat perhatian. Krisis ekonomi tahun 1997 memperlihatkan masyarakat kota masih rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin perkotaan cenderung meningkat. Umumnya masyarakat miskin perkotaan mengalami kemiskinan yang berbeda dengan penduduk miskin pedesaan. Mereka lebih sering mengalami keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam memperoleh dan memanfaatkan ruang usaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, layanan pendidikan dan kesehatan, dan rasa aman dari tindak kekerasan. Umumnya masyarakat miskin perkotaan bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di pemukiman tidak sehat dan rentan.

Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam rumahtangga dan masyarakat, sehingga kemiskinan yang dialami juga berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol dan prioritas yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik.

Permasalahan yang terjadi adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di keluarga maupun masyarakat. Masalah mendasar lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosial dan budaya masyarakat. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas. Masalah ketidakadilan gender juga ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index*, GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*, GEI), banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan atau peduli anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

Beberapa penelitian seperti dari Kimhi (2004); Knowles (2002); Cameron (2000); Sukherman (2001); Balisacan et.al (2003); Foster & Szekely (2002); Booth (2000); Niskanen (1996); Islam (2003) dan Iradian (2005) menjelaskan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya tingkat pendidikan (dan tingginya *adult literacy*), tingginya rasio ketergantungan, adanya ketimpangan distribusi pendapatan, tingginya persentase tenaga kerja di sektor pertanian, dan rendahnya partisipasi tenaga kerja di sektor industri. Hasil-hasil penelitian tersebut sekaligus merekomendasikan bahwa untuk menentukan kebijakan pengurangan kemiskinan maka terlebih dahulu diketahui faktor penyebab kemiskinan tersebut. Karena kemiskinan merupakan —lingkaran setan (*virtuous circle*) yang hanya bisa di putus jika kita benar-benar mengetahui dengan tepat di mana memulai untuk memutusnya. Kemiskinan juga merupakan sebab dan akibat dari faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu sendiri.

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM (Indek Pembangunan manusia). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu *pertama*, usia hidup (*longevity*) yang mengupayakan agar penduduk dapat mencapai —usia hidup¹ yang panjang dan sehat. UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e_0 yang merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Angka kematian bayi tidak digunakan karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara maju. Di Indonesia e_0 dihitung menggunakan dua data yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. *Kedua*, pengetahuan (*knowledge*), diukur dengan angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years school*). *Ketiga*, standar hidup layak (*decent living*), dimana UNDP memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator hidup layak.

Nugroho & Dahuri, 2004:165-168 menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, yang dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Terdapat dua pendekatan mengukur tingkat kemiskinan yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. *Pertama*, pendekatan absolut, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang yang tidak mampu keluar dari ukuran tersebut dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya berupa tingkat pendapatan, konsumsi kalori seseorang dalam satu waktu tertentu, dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut. Pendekatan absolut lebih mudah diterapkan karena hanya membandingkan dengan batasan yang dikehendaki (Nugroho & Dahuri, 2004:169). Kemiskinan absolut dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Besarnya masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada di bawah —tingkat minimum‖ yang telah ditetapkan (Ahluwalia, 1974:10 dalam Wie, 1981:6). Tahap penting dalam usaha pengukuran kemiskinan adalah menentukan ukuran garis kemiskinan secara umum yang diterapkan di seluruh negara. Dalam menentukan kemiskinan absolut diperlukan pola taraf konsumsi minimum untuk melangsungkan kehidupan. Untuk menentukan ukuran kemiskinan absolut kadang-kadang ukuran tingkat kebutuhan biologis tidak tepat, dimana dalam beberapa kasus kemiskinan, ukuran kebutuhan biologis tidak mencerminkan suatu kemiskinan absolut. Jadi konsep garis kemiskinan hanya dapat berjalan ketika kita berada dalam ruang lingkup sosial. Bila dalam ruang lingkup sosial tertentu menerapkan suatu standar hidup yang tinggi maka individu berusaha menyesuaikan berdasarkan standar lingkungannya. Konsep garis kemiskinan menjadi perdebatan di beberapa negara karena konsep ini mencerminkan perbedaan taraf ekonomi, social, dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, ukuran kemiskinan akan berubah menurut waktu. Dalam beberapa penelitian, ukuran yang paling banyak dipakai dalam pengukuran garis kemiskinan adalah total belanja konsumsi yaitu total konsumsi yang memenuhi kebutuhan sebesar 2.250 kalori per hari per individu.

Kedua, pendekatan relatif, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolut namun lebih ditekankan pada proporsi relatif. Misalnya garis kemiskinan adalah 20% pendapatan terendah, median dari distribusi pendapatan dan lain-lain (Nugroho & Dahuri, 2004: 169). Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila sekiranya seluruh tingkat kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan mutlak/absolut. Kelemahan konsep ini justru terletak pada sifatnya yang dinamis. Secara implisit akan terlihat bahwa —kemungkinan kemiskinan akan selalu berada di antara kita. Dalam setiap waktu akan selalu terdapat sejumlah penduduk dari total penduduk yang dapat dikategorikan sebagai miskin. Sehingga berbeda dengan konsep kemiskinan absolut jumlah orang miskin tidak mungkin habis sepanjang zaman (Esmara, 1986:293).

Ukuran/kriteria kemiskinan sangat diperlukan untuk menetapkan sasaran yang hendak dihapuskan. Kriteria kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didefinisikan sebagai penduduk yang merupakan anggota dalam Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I) karena alasan ekonomi. Kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal. Kemiskinan dapat diestimasi melalui ukuran *Head Count Index* (HCI). HCI merupakan ukuran yang menyatakan persentase populasi dengan tingkat konsumsi per kapita di bawah

garis kemiskinan. Rumus perhitungan HCI adalah:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \quad \text{Dimana: } \alpha =$$

0,1,2...n; z = garis kemiskinan; y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan $y_i < q$, $i = 1,2,3...q$; q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; n = jumlah penduduk. Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh *Head Count Index*; dan jika $\alpha = 1$ diperoleh *Poverty Gap Index*. World Bank dan UNDP dalam Berg (2004:511), menyatakan garis kemiskinan untuk negara berkembang sebesar \$1 U.S dan \$2 U.S per hari per kapita dan garis kemiskinan untuk negara maju sebesar \$14 U.S per hari per kapita (U.S. Dollars disesuaikan dengan *real purchasing power*). Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*) atau IKM adalah indeks komposit yang mengukur deprivasi (keterbelakangan) dalam tiga dimensi yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks ini disusun dengan tiga indikator yaitu: penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang yang diukur dengan peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup sampai 40 tahun (P_1), ketinggalan dalam pendidikan yang diukur dengan angka buta huruf dewasa atau penduduk 15 tahun ke atas (P_2) dan akses terhadap pelayanan dasar (P_3) yang diukur dengan persentase penduduk tanpa akses air bersih (P_{31}), persentase penduduk yang tidak memiliki akses ke sarana kesehatan (P_{32}), dan persentase balita dengan status gizi

kurang (P_{33}), sehingga dapat dirumuskan sebagai:
$$P_3 = \frac{1}{3} [P_{31} + P_{32} + P_{33}]$$
. Metode

perhitungan IKM mengikuti metode *Human Development Report* yang dari UNDP, yaitu:

$$IKM = \sqrt[3]{\frac{1}{3} (P_1^3 + P_2^3 + P_3^3)}$$

World Bank menyatakan penyebab kemiskinan adalah ledakan penduduk (*population growth*) yang tidak terkendali karena ledakan penduduk akan menyebabkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) tinggi. Argumen ini sesuai dengan pandangan aliran keras tentang populasi dan krisis global (Todaro, 2000:283-286) yang mengaitkan semua penyakit ekonomi dan sosial di dunia sebagai akibat pertambahan penduduk yang tidak dibatasi dan dianggap sebagai penyebab pokok terjadinya kemiskinan, standar hidup yang rendah, kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, degradasi lingkungan, dan masalah sosial lainnya. Malthus (1798) dalam Todaro (2000:268) menyatakan ledakan penduduk akan menimbulkan pola hidup yang serba pas-pasan (*subsisten*). Pemikiran neo-Malthus menyatakan bangsa-bangsa yang miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dari tingkat subsisten, kecuali mereka mengadakan pengendalian preventif (*preventive checks*) terhadap pertumbuhan populasi mereka, atau dengan menerapkan pengendalian kelahiran. Kemiskinan juga di sebabkan kebijakan pemerintah tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Akibat kebijakan tersebut pendapatan per kapita akan naik, tetapi kenaikan pendapatan per kapita tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang. Efeknya akan muncul kemiskinan struktural dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara bagian terbesar masyarakat yang tetap miskin. Keadaan ini sesuai dengan teori —*trade off between growth and equity* yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan atau makin tidak merata, dan sebaliknya upaya pemerataan dapat terwujud dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah (Todaro, 2000:206). Beberapa penelitian menyatakan kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat distribusi pendapatan yaitu dari Bourguignon (2004); Lopez (2004); dan Iradian (2005).

Djoyohadikusumo (1994:214); Esmara (1986:21); Islam (2003) menyatakan faktor penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, yang menyebabkan kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pendidikan juga berpengaruh kepada kemampuan seseorang untuk memperoleh dan

memanfaatkan faktor produksi (produktifitas). Kuntjoro (2003:131) menyatakan sebuah negara miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode produksi yang tradisional dan seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Sektor pertanian dianggap sebagai sektor pemicu kemiskinan karena, seperti dinyatakan oleh Lewis dalam Todaro (2000:100), sektor pertanian merupakan sektor subsisten yang kelebihan penduduk dan produktivitas marjinal tenaga kerjanya hampir sama dengan nol. Berdasarkan data BPS pertengahan Juni 2010 jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu 7.419 dari jumlah penduduk 151.078 jiwa (30.932 KK) tersebar di lima kecamatan dan di 22 kelurahan. Angka kemiskinan tertinggi ada dikawasan perkotaan (miskin kota), terutama di Kec. Metro Pusat dengan angka RTM sebesar 3.154 RTM dari 10.834 KK, tersebar di 5 kelurahan yaitu Metro, Hadimulyo Barat, Imopuro, Hadimulyo Timur, dan Yoso Mulyo dengan angka kemiskinan tertinggi di Kelurahan Metro. Angka kemiskinan tertinggi tersebut yang ada di Kec. Metro Pusat diikuti oleh dua daerah penyangga perkotaan yaitu di dua kecamatan yang terdiri dari Kec. Metro Timur sejumlah 1.305 dari jumlah KK 6.812 dan Kec. Metro Barat 1.181 RTM dari jumlah KK 5.107. Kemiskinan terendah ada di kawasan pinggiran Kota Metro yang jauh dari akses strategis perkotaan, terutama di Kec. Metro Utara dan Selatan.

Akhirnya, kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi, dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan menjadi sangat beragam dengan sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri, temuan dari berbagai kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari kegiatan survey. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan studi tentang karakteristik kemiskinan. Permasalahan yang diteliti dalam survey ini adalah bagaimana karakteristik Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin di Kota Metro dengan menggunakan parameter Rasio Ketergantungan (*dependensi ratio*) dan Indeks Pembangunan Manusia?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *survey*. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penerima Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) yang berjumlah 5.962 KK yang berada di 22 kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan di Kota Metro. Jumlah sampel/responden yang diambil dalam *survey* ini adalah 375 KK penerima Raskin yang di ambil secara proporsional per kelurahan yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Umar, 2002:102). Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner terbuka yaitu responden mengisi jawaban terhadap pertanyaan berdasarkan data yang mereka ketahui/miliki. Kuisisioner terbuka digunakan karena data yang diperlukan adalah data pribadi dan/atau data keluarga responden. Teknik analisis data yang dilakukan adalah penghitungan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dan penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM) rumah tangga miskin (RTM) penerima Raskin.

Hasil dan Pembahasan

Rasio Ketergantungan Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia tidak produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan tanggungan beban hidup yang harus ditanggung oleh anggota keluarga yang produktif terhadap anggota keluarga yang tidak produktif. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kelahiran, semakin besar jumlah keluarga

tidak produktif, maka semakin besar nilai rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung dengan rumus:

$$DR = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 14 thn} + \text{usia 65 thn ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 thn)}} \times 100$$

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 64,7%. Angka ini berarti setiap 100 orang penduduk produktif menanggung beban hidup sebanyak 64-65 orang yang belum produktif (usia 1-14 tahun) atau tidak produktif (usia 65 tahun keatas). Tingginya beban tanggungan ini sebagian besar (83%) disebabkan oleh banyaknya penduduk usia 1-14 tahun. Fakta ini mengindikasikan Pemkot Metro harus lebih memperhatikan penambahan penduduk (angka kelahiran) khususnya bagi kelompok masyarakat miskin penerima Raskin. Kebijakan yang dapat diambil untuk menekan angka kelahiran misalnya penggalakan kembali program KB, Posyandu, dan Poskeskel. Melalui program ini diharapkan masyarakat miskin dapat teredukasi tentang pentingnya mengatur angka kelahiran, jarak kelahiran, dan bahaya beban hidup akibat angka kelahiran yang tidak terkendali.

Hasil penghitungan rasio ketergantungan anak (*Child Dependency Ratio*) menunjukkan nilainya adalah 53,4%. Angka ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 53 orang anak-anak usia belum produktif. Hasil *survey* juga menunjukkan rata-rata jumlah anak di keluarga RTM penerima Raskin adalah 4 orang anak. Rasio ketergantungan anak digunakan untuk menunjukkan besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap anak-anak di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Rasio ketergantungan anak ini di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CDR = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun}} \times 100$$

Hasil penghitungan rasio ketergantungan lanjut usia (*Old Dependency Ratio*) menunjukkan nilainya adalah 11,3%. Angka ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 11 orang lanjut usia yang sudah tidak produktif lagi. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap pendudukan lanjut usia di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Nilai rasio ketergantungan lanjut usia yang ada di Kota Metro ini sudah sangat ideal karena rasio ketergantungan lanjut usia sangat kecil dan berada di bawah 50%. Rasio ketergantungan di bawah 50% ini akan memudahkan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Rasio ketergantungan usia lanjut ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ODR = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 65 tahun keatas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun}} \times 100$$

Selanjutnya yang penting dilakukan oleh Pemkot Metro adalah menurunkan rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) dan rasio ketergantungan anak (*Child Dependency Ratio*) hingga dibawah 50%. Jika Pemerintah Kota Metro berhasil menurunkan rasio ketergantungan tersebut hingga di bawah 50%, maka daerah akan memperoleh —bonus demografil. Bonus demografi tersebut berupa, *pertama*, keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang. *Kedua*, penurunan proporsi penduduk muda yang akan mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. *Ketiga*, munculnya suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, yaitu munculnya *window of opportunity*.

Window of opportunity merupakan ‘celah sempit’ sebagai bonus demografi, yaitu suatu kesempatan yang hanya terjadi satu kali bagi semua penduduk daerah tertentu. Kesempatan tersebut berupa tersedianya kondisi yang sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk produktif dengan non-produktif. Pada saat itu rasio ketergantungan adalah yang terendah, biasanya nilainya berada di bawah 50%. Untuk memuncalnya *window of opportunity* maka Pemkot Metro dapat melakukan kebijakan transisi demografi. Transisi demografi dapat dilakukan dengan menurunkan angka kelahihan (*fertility*) dan angka kematian (*mortality*) hingga mencapai angka yang rendah, sehingga pertumbuhan penduduk mendekati nol. Proses transisi demografi dianggap selesai ketika nilai $NRR = 1$. Angka Reproduksi Netto/*Net Reproduction Rate* (NRR) merupakan angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anak perempuan yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi seandainya wanita tersebut mengikuti pola fertilitas yang berlaku pada saat angka itu dihitung, dengan memperhatikan kelangsungan hidup wanita itu selama masa reproduksi.

Kebijakan transisi demografi yang diambil pemerintah akan dapat memunculkan dampak positif yaitu, *pertama*, menurunkan proporsi jumlah anak (usia 0-15 tahun) karena adanya penurunan tingkat fertilitas. *Kedua*, meningkatkan jumlah anak yang *survived* keusia dewasa, karena penurunan kematian bayi. *Ketiga*, terjadi ledakan penduduk usia kerja. Ledakan penduduk usia kerja ini akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan ledakan penduduk karena tingkat fertilitas yang tinggi. Karena ledakan penduduk yang disebabkan tingkat fertilitas yang tinggi justru hanya akan meningkatkan Rasio Ketergantungan (*Depen-dency Ratio*) dan Rasio Ketergantungan Anak (*Child Dependency Ratio*). *Keempat*, angka ketergantungan akan turun hingga mencapai titik terendah, sehingga akan memunculkan kondisi yang disebut *window of opportunity*.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin

IPM merupakan indek komposit yang dibangun berdasarkan tiga komponen yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). IPM merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan pembangunan daerah. Usia hidup di ukur dengan angka harapan hidup (AHH) atau e_0 (*life expectancy at birth*), pengetahuan di ukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*-MYS), dan standar hidup layak yang di ukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Teknik penghitungan IPM dilakukan melalui tiga tahap, *pertama*, menghitung nilai angka harapan hidup (e_0), angka melek huruf, rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*-MYS), dan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (PPP/unit). *Kedua*, menghitung indek angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan, dan PPP/unit yang distandarkan dengan nilai maksimum dan minimumnya. *Ketiga* menghitung IPM dengan merata-ratakan jumlah masing-masing komponen IPM.

1. Menghitung nilai angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata konsumsi riil yang disesuaikan.

Angka harapan hidup (AHH atau e_0) rumah tangga miskin penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 yang dihitung menggunakan *Software Mortpak For Windows 4.0* dengan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak masih hidup (AMH) adalah 74,33 tahun. AHH ini menunjukkan perkiraan jumlah tahun hidup seseorang di wilayah tertentu. Artinya anggota keluarga RTM penerima Raskin ini dalam kondisi normal (tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur) memiliki kesempatan hidup hingga berumur 74,33 tahun dari sejak dia dilahirkan. Angka AHH RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan angka AHH kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih lebih tinggi, yaitu Kota Bandar Lampung (70,5), Kota Metro (72,4), Provinsi Lampung (69,3). Bahkan jika dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih tinggi, yaitu Kota Bekasi (69,99),

Kota Balikpapan (73,30), Kota Samarinda (72,77), Kota Tarakan (73,55), Kota Bontang (73,88), dan Indonesia (71,4). Namun demikian perbandingan ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota yang banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, dan keterampilan yang variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro. Hal yang perlu menjadi titik tekan bagi Pemkot Metro adalah bahwa usia hidup yang panjang bagi RTM penerima Raskin harus diikuti dengan kehidupan yang sehat. Karena nilai AHH juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat yang sehat harus diciptakan sejak mereka dilahirkan. Oleh karena itu program Pemkot Metro yang selama ini telah berjalan, yaitu Poskeskel, Posyandu, Posdaya, dan PHBS harus tetap dijalankan dan ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin terwujudnya usia hidup yang panjang dan sehat bagi RTM penerima Raskin. Apabila AHH suatu daerah berada di bawah rata-rata nasional (Indonesia) maka daerah tersebut memerlukan program pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, dan program pemberantasan kemiskinan yang lebih intensif. Untuk Kota Metro kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan karena nilai AHH-nya masih di atas rata-rata nasional (71,04).

Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dewasa dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf dewasa (*adult literacy rate*) diperoleh dari persentase proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya dengan total penduduk berusia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf dewasa

$$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t}$$

RTM penerima Raskin dapat dihitung menggunakan rumus: angka melek huruf (penduduk usia > 15 tahun) pada tahun-*t*; *L* = jumlah penduduk (usia > 15 tahun) yang bisa membaca dan menulis pada tahun-*t*; *P* = jumlah penduduk usia > 15 tahun; *t* = tahun observasi. Berdasarkan hasil *survey* nilai angka melek huruf RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 87,9%. Angka ini memiliki arti setiap 100 orang RTM penerima Raskin maka sebanyak 87-88 orang diantaranya dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan angka melek huruf kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih lebih rendah, yaitu Kota Bandar Lampung (98,44), Kota Metro (97,36), Provinsi Lampung (94,37). Demikian halnya jika dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (98,87), Kota Balikpapan (97,98), Kota Samarinda (96,95), Kota Tarakan (97,89), Kota Bontang (98,10), dan Indonesia (91,87). Namun demikian perbandingan ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota-kota yang didalamnya banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, keterampilan, dll yang variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro).

Rendahnya angka melek huruf dewasa RTM penerima Raskin ini tentunya memerlukan penanganan yang lebih serius dari Pemkot Metro untuk segera mengentaskan masyarakat usia produktif (15-65 tahun) dari berbagai ketertinggalan pengetahuan yang disebabkan ketidakmampuan membaca dan menulis. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan angka melek huruf adalah penyelenggaraan secara massal dan intensif program kejar paket A dan paket B. Harapannya dengan pemassalan tersebut tidak hanya mampu menolong mereka mengatasi keengganan dan rasa malu untuk belajar tetapi juga mampu menaikkan angka IPM. Yang perlu dipahami disini adalah dalam RTM biasanya terjadi —lingkaran setan (*virtuous circle*) kemiskinan. Misalnya ketidakmampuan membaca dan menulis ini terjadi bukan karena RTM tersebut malu, enggan, atau tidak mau belajar, tetapi mungkin karena mereka tidak memiliki biaya untuk belajar karena rendahnya pendapatan. Selanjutnya rendahnya pendapatan RTM ini mungkin terjadi bukan karena mereka tidak bekerja, tetapi kemungkinan karena mereka mendapatkan gaji/upah yang rendah

karena tingkat pendidikannya rendah. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar memahami dan memiliki cara yang tepat dan cepat tentang bagaimana memotong ‘lingkaran setan’ tersebut untuk membantu meningkatkan melek huruf RTM penerima Raskin.

Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan (*mean years of schooling*-MYS). Komponen MYS RTM penerima Raskin di

$$MYS_{15+,t} = \frac{\sum EDU_{i,t}}{\sum P_{15+,t}}$$

hitung dengan menggunakan rumus: $MYS_{15+,t}$, dimana MYS = rata-rata lama sekolah penduduk > 15 tahun; EDU = jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah/ditamatkan oleh penduduk usia > 15 tahun; P = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas; i = jenjang pendidikan (SD s.d S-1); dan t = tahun observasi. Berdasarkan hasil *survey* nilai MYS RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 9,04 tahun. Angka ini memiliki arti rata-rata sekolah yang ditamatkan oleh RTM penerima Raskin adalah sampai tamat SMP atau yang sederajat. Angka MYS RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan angka MYS kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih sedikit lebih rendah, yaitu Kota Bandar Lampung (9,91 tahun), Kota Metro (9,82 tahun), namun masih diatas Provinsi Lampung (7,49 tahun). Demikian halnya jika dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (10,89 tahun), Kota Balikpapan (10,03 tahun) Kota Samarinda (9,73 tahun), Kota Tarakan (9,13 tahun), dan Kota Bontang (9,90 tahun), namun masih di atas rata-rata Indonesia (7,47 tahun). Namun demikian perbandingan ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota-kota yang didalamnya banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, keterampilan, dll yang variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro).

Catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Metro adalah sebagai kota yang memiliki visi sebagai kota pendidikan, sebaiknya pemerintah lebih giat meningkatkan derajat pendidikan terutama untuk RTM penerima Raskin. Peningkatan jenjang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sehingga membuka peluang untuk terbebas dari jerat kemiskinan. Namun demikian *best practice* yang telah di miliki oleh Pemkot Metro adalah program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun) dari pemerintah pusat sudah berhasil diterapkan di Kota Metro hingga menyentuh kelompok RTM penerima Raskin. Artinya di Kota Metro kelompok masyarakat yang —paling bawahl (warga miskin) sudah dapat menikmati pendidikan hingga tingkat SMP dan yang sederajat. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkot Metro untuk meningkatkan MYS RTM penerima Raskin misalnya (1) optimalisasi pelaksanaan program jam belajar yang selama ini sudah diterapkan di Kota Metro, (2) penambahan jumlah institusi pendidikan luar sekolah (PLS) dalam bentuk kejar paket khususnya paket A, bahkan jika perlu sampai ketinggian kelurahan/RT/RW terdapat satu institusi, dan (3) perbaikan sarana prasarana pendidikan luar sekolah (kejar paket). Selain itu untuk lebih mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah perlu kiranya dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan anak-anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang SMA/MA/ SMK. Cara lain yang bisa di tempuh adalah dengan mewajibkan masyarakat golongan dewasa yang belum menempuh atau tidak menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMA/MA/SMK agar mengikuti program pendidikan luar sekolah yakni kelompok belajar kejar paket A dan paket B.

Komponen standar hidup layak di ukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Penghitungan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan dilakukan melalui lima langkah, yaitu menghitung pengeluaran per kapita dari data Susenas Modul, menaikkan nilai pengeluaran per kapita sebesar 20%, mendeflasi pengeluaran per kapita dengan Indeks Harga Konsumen, menghitung nilai daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP), membagi pengeluaran per kapita yang terdeflasi dengan PPP, mengurangi nilai pengeluaran

per kapita yang terdeflasi dengan PPP dengan menggunakan rumus Atkinson. Berdasarkan publikasi dari BPS (2010) diketahui bahwa nilai pengeluaran per kapita dari data Susenas Modul adalah Rp 411.603,-. Stelah dinaikkan sebesar 20%, maka nilainya menjadi Rp 493.924,-. Nilai pengeluaran per kapita ini selanjutnya dideflasikan dengan nilai IHK Kota Bandar Lampung (sebagai Kota rujukan di Propinsi Lampung) dan diperoleh nilai pengeluaran per kapita sebesar Rp 516.503,-.

Langkah selanjutnya penghitungan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan adalah menghitung nilai daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP/unit). Data dasar yang digunakan untuk menghitung PPP/unit adalah harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul. Standar harga yang digunakan adalah harga 27 komoditi di Jakarta Selatan. Rumus penghitungan PPP/unit

adalah:
$$PPP = \frac{\sum E_{(i,j)}}{\sum P_{(i,j)} \cdot Q_{(i,j)}}$$
 dimana $E_{(i,j)}$ = pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke- i ;

$P_{(i,j)}$ = harga komoditi j di daerah - i (Jakarta Selatan); dan $Q_{(i,j)}$ = jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di daerah- i . berdasarkan rumus tersebut dan setelah melalui pengurangan menggunakan rumus Atkinson maka diperoleh nilai rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan untuk RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 yaitu sebesar Rp 521.721,-. Nilai ini jika dibandingkan dengan angka nilai rata-rata konsumsi riil kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih lebih rendah, yaitu Kota Bandar Lampung (Rp 570.753), Kota Metro (Rp 569.411), dan Provinsi Lampung (Rp 557.425). Jika dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (Rp 569.770), Kota Balikpapan (Rp 640.000), Kota Samarinda (Rp 639.500), Kota Tarakan (Rp 634.210), Kota Bontang (Rp 625.250), dan Indonesia (Rp 624.370). Namun demikian perbandingan ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota yang didalamnya banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, dan keterampilan yang variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro. Hasil penghitungan nilai angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata konsumsi riil yang disesuaikan disajikan dalam tabel 1.

2. Menghitung indek angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata konsumsi riil yang disesuaikan.

Agar dapat dijadikan sebagai salah satu komponen yang dapat digunakan untuk menghitung IPM, maka nilai AHH, angka melek huruf, MYS, dan PPP/unit harus dihitung indeks-nya dengan cara menstandarkan dengan nilai maksimum dan minimumnya seperti yang tertera dalam tabel 3.4 menjadi sebuah indeks. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks komponen berdasarkan nilai AHH, angka melek huruf, MYS, dan

PPP/unit adalah:
$$\text{Indeks } X_i = \frac{(X_i - X_{min})}{(X_{maks} - X_{min})}$$
 dimana X_i = nilai komponen IPM ke- i ;
 X_{maks} = nilai maksimum X_i ; dan X_{mins} = nilai minimum X_i yang tertera dalam tabel 3.4. Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh nilai indek harapan hidup (AHH) RTM penerima Raskin sebesar 82,2. Nilai indek ini nantinya akan menjadi salah satu komponen penghitungan IPM.

Tabel 1. Nilai Indek Komponen Penyusun IPM RTM Penerima Raskin Kota Metro

No.	Komponen Penyusun IPM	Nilai
-----	-----------------------	-------

1.	Angka Harapan Hidup (AHH atau e_0)	74,33 tahun
2.	Angka Melek Huruf	87,90%
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	9,04 tahun
4.	PPP/Unit	Rp 521.721

Berdasarkan rumus penghitungan indeks komponen IPM, maka diperoleh nilai indeks rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*-MYS) RTM penerima Raskin sebesar 60,3. Sedangkan nilai indeks angka melek hurufnya adalah 87,9. Nilai indeks rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (PPP/unit) untuk RTM penerima Raskin adalah 50,0. Nilai-nilai indeks ini nantinya akan menjadi salah satu komponen penghitungan IPM. Dalam teknik penghitungan IPM, angka melek huruf dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*-MYS) merupakan nilai untuk menghitung komponen pengetahuan/tingkat pendidikan. Dalam rumusan penghitungan komponen pengetahuan, maka angka melek huruf dewasa memiliki porsi $2/3$ dan MYS memiliki porsi $1/3$. Nilai komponen

pengetahuan RTM penerima Raskin Metro di hitung dengan rumus:

$$IP = \frac{2}{3}ADL + \frac{1}{3}MYS$$

dimana IP = indeks pendidikan; ADL = angka melek huruf; dan MYS = indeks rata-rata lama sekolah. Berdasarkan hasil *survey* dan hasil penghitungan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, maka diketahui indeks pengetahuan RTM penerima Raskin sebesar 78,7. Hasil penghitungan indeks komponen penyusun IPM tersebut dapat diringkas dalam tabel 2.

Tabel 2. Nilai Indeks Komponen Penyusun IPM RTM Penerima Raskin Kota Metro

No.	Komponen Penyusun IPM	Nilai Indeks
1.	Angka Harapan Hidup (AHH atau e_0)	82.2
2.	Pendidikan	78.7
3.	Kemampuan Daya Beli	50.0

3. Menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) RTM Penerima Raskin

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang tersusun atas tiga komponen, yaitu indeks angka harapan hidup (AHH) atau e_0 (*life expectancy at birth*), indeks pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*-MYS), dan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (PPP/unit). IPM RTM penerima Raskin Kota Metro dapat di hitung menggunakan rumus: $IPM = \frac{1}{3}[X_1 + X_2 + X_3]$, dimana $X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup; $X_{(2)}$ = Indeks pendidikan ($\frac{2}{3}$ indeks melek huruf dan $\frac{1}{3}$ indeks rata-rata lama sekolah); dan $X_{(3)}$ = Indeks konsumsi riil yang telah disesuaikan. Berdasarkan rumus tersebut, maka nilai IPM RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 70,31. Angka ini jika dibandingkan dengan angka IPM kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih sedikit lebih rendah, yaitu Kota Bandar Lampung (75,35), Kota Metro (75,98), dan Provinsi Lampung (70,93). Jika dibandingkan dengan kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (75,81), Kota Balikpapan (77,61), Kota Samarinda (76,82), Kota Tarakan (76,61), Kota Bontang (76,72), dan Indonesia (71,54). Namun demikian perbandingan ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota yang didalamnya banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, dan keterampilan yang variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin (RTM penerima Raskin Kota Metro). Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, tinggi rendahnya status indeks pembangunan manusia menurut UNDP dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu (a) tingkatan *rendah*, jika $IPM < 50$; (b) tingkatan *menengah*, jika $50 < IPM < 80$; dan (c) tingkatan *tinggi*, jika $IPM > 80$. Namun untuk kepentingan perbandingan antar daerah di Indonesia, yaitu perbandingan antar kabupaten/kota, maka kriteria tingkatan menengah di pecah menjadi dua golongan. Sehingga status tinggi rendahnya IPM berubah menjadi (a) tingkatan *rendah*, jika $IPM < 50$; (b) tingkatan *menengah-bawah*, jika $50 < IPM < 66$; (c)

tingkatan *menengah-atas*, jika $66 < IPM < 80$; dan (d) tingkatan *atas*, jika $IPM > 80$. Dengan demikian IPM RTM penerima Raskin Kota Metro berada pada kriteria *menengah-atas*.

Untuk meningkatkan nilai IPM RTM penerima Raskin, maka yang perlu ditekankan adalah peningkatan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli masyarakat (tabel 1). Untuk itu Pemerintah Kota Metro dapat melakukan akselerasi wajib belajar (wajar) 9 tahun menuju wajib belajar hingga 12 tahun (setingkat sekolah menengah pertama). Hal ini sangat mungkin dilakukan karena visi Kota Metro yang memang menginginkan menjadi kota pendidikan di Provinsi Lampung. Kebijakan penuntasan buta huruf dapat diakselerasi melalui pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidika luar sekolah, dan madrasah salafiyah. Pemkot Metro dapat melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam dunia pendidikan guna mengantisipasi angka rawan *droup-out* murid sekolah. Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kota Metro harus lebih meningkatkan porsi anggaran untuk pendidikan secara bertahap. Revitalisasi gedung-gedung sekolah juga sangat perlu dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Efisiensi pengelolaan pendidikan dalam bentuk peningkatan keterampilan/ kemampuan guru perlu dilakukan untuk meningkatkan suasana belajar yang lebih mandiri dan bersahabat. Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan RTM penerima Raskin dalam pengembangan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya investasi, baik swasta maupun pemerintah, lebih diarahkan pada bidang-bidang usaha yang langsung bersentuhan dengan RTM penerima Raskin. Jika diperlukan Pemerintah Kota Metro dapat membuat kebijakan, aturan, perda, dll yang mewajibkan pengusaha untuk menyalurkan dananya, misalnya CSR (*customer social responsibility*) untuk kegiatan yang *pro poor* dan *pro growth*.

Penutup

Kesimpulan hasil survey ini adalah nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 64,7%. Artinya setiap 100 orang penduduk produktif menanggung beban hidup sebanyak 64-65 orang yang belum produktif (usia 1-14 tahun) atau tidak produktif (usia 65 tahun keatas). Sedangkan nilai rasio ketergantungan anak (*Child Dependency Ratio*) adalah 53,4%. Angka ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 53 orang anak-anak usia belum produktif. Hasil penghitungan rasio ketergantungan lanjut usia (*Old Dependency Ratio*) menunjukkan nilainya adalah 11,3%. Angka ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 11 orang lanjut usia yang sudah tidak produktif lagi. Nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 70,31 yang berarti berada pada tingkatan *menengah-atas*. Kebijakan yang dapat dilakukan Pemkot Metro untuk mengurangi rasio ketergantungan adalah melakukan transisi demografi. Kebijakan transisi demografi ini akan berdampak pada diperolehnya —bonus demografi— dan akan memunculkan *window of opportunity* yang memungkinkan pemerintah melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan. Di bidang peningkatan IPM, Pemkot Metro hendaknya melakukan akselerasi dan intensifikasi program wajar 12 tahun, pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidikan luar sekolah, dan madrasah salafiyah untuk meningkatkan angka melek huruf, dan melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Pemerintah juga harus meningkatkan porsi anggaran untuk pendidikan secara bertahap dan melakukan revitalisasi sarana sekolah. Di bidang peningkatan daya beli, pemerintah harus lebih melibatkan RTM penerima Raskin dalam kegiatan perekonomian mikro dan kecil serta mengarahkan investasi pada sektor yang langsung bersentuhan dengan RTM penerima Raskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Balisacan, A. & Pernia, E. & Asra, A. (2003). *Revisiting, Growth and Poverty Reduction in Indonesia: What Do Subnational Data Show?*. Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol 39. No. 3.
- Berg, Hendrik V. D. (2004). *Economic Growth and Development*. New York: Mc. Grow-Hill.
- Booth, Anne. (2000). Poverty and Inequality in the Soeharto Era: *An Assesment*. Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol.36, No.1.
- Bourguignon, Francois. (2004). *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Report on Indian Council For Research on International Eco Relations, New Delhi.
- BPS. (2010). Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi: Berdasarkan Susenas Panel Maret 2010. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Cameron, Lisa A. (2000). *Poverty and Inequality in Java: Examining the Impact of The Changing Age, Educational, and Industrial Structure*. Journal of Development Economics, Vol. 62 (2000).
- Djodjohadikusumo, Sumitro. (1994). *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Esmara, Hendra. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Foster E. James dan Szekely, Miguel. (2002). *Is Economic Growth Good for the Poor? Tracking Low Incomes Using General Means*. Report on Symposium on Poverty Measurement, Mexico.
- Iradian, Garbis. (2005). *Inequality, Poverty, and Growth: Cross Country Evidence*. IMF Working Paper. Middle East and Central Asia Departement.
- Islam, Rizwatul. (2003). *The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction An Empirical Analysis*. Report on Seminar on Accelerating Growth and Poverty Reduction in Bangladesh. ILO, Geneva.
- Kimhi, Ayal. (2004). *Growth, Inequality, and Labor Markets in LDCs: A Survey*. Discussion Paper No. 8.04, The Hebrew Univercity of Jerussalem.
- Knowles, James. C. (2002). *A Look at Poverty in The Developing Countries of Asia*. Asia-Pacific Population & Policy, No. 52, January 2000.
- Kuntjoro, Mudrajad. (2003). *Ekonomi pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lopez, Humberto. (2004). *Pro Growth, Pro Poor: Is There a Trade Off*. The World Bank.
- Niskanen, William A. (1996). *Welfare and Culture of Poverty*. The Cato Jurnal, Vol. 16 No. 1
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sukherman, Maman. (2001). *Assosiasi Kemiskinan Dengan Peubah Sosek di Propinsi Jawa Barat*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran. Vol. 3, No. 1, Januari 2001 : 47-64.
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Jilid I. Terjemahan Hasris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Umar, Husein. (2002). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wie, Thee Kian. (1983). *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3ES.